

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal tetapi juga karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungannya (Purnasiwi, 2011). Pencapaian prestasi perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Perusahaan dituntut untuk melakukan suatu tindakan yang lebih peduli kepada masyarakat dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dikenal sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan.

Ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang (Nor Hadi, 2011). Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Wiwoho (2008) menjelaskan bahwa pada saat banyak perusahaan menjadi semakin berkembang, maka pada saat itu pula kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi,

karena itu muncul kesadaran untuk mengurangi dampak negatif. Banyak perusahaan kini mengembangkan CSR.

Kesadaran perusahaan untuk melaksanakan CSR semakin meningkat, hal ini diungkapkan La Tofi Ketua Umum Forum CSR Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa banyak perusahaan di Indonesia telah mengintegrasikan CSR sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Perusahaan yang menginginkan usahanya berkembang, maka CSR juga harus dikembangkan. Sementara itu pada kesempatan yang sama Direktur *Sustainable Natural Resource Management* CSR Indonesia, Wahyu Aris Darmono, juga menyebutkan bahwa peningkatan pelaksanaan CSR di tahun 2013 adalah akibat kesadaran para pemimpin perusahaan terhadap perubahan iklim yang semakin meningkat. Tujuannya adalah untuk membawa perusahaannya menjadi *green company* dan akan meningkatkan prospek bisnis perusahaan (Tristiari, 2014).

Perusahaan yang melakukan pertanggung jawaban sosial perlu disampaikan kepada *stakeholder*. Oleh karena itu, perlu adanya pengungkapan atas pertanggung jawaban sosial yang dilakukan perusahaan. Pengungkapan pertanggung jawaban sosial memainkan peranan penting bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan setiap aktivitas atau operasional perusahaan memiliki dampak sosial dan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Triple bottom lines merupakan salah satu konsep CSR yang terkenal. Teori ini memberi pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan “3P” yaitu *profit*, *people*, dan *planet* (Muttaqin, 2013). Selain memperoleh keuntungan, perusahaan harus memperhatikan dan terlibat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan harus turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (Wibisono, 2007).

Menurut Robbins dan Coulter (2005) dalam Arifian (2011), tanggung jawab sosial perusahaan dibedakan menjadi dua pandangan, yaitu pandangan klasik dan pandangan sosial ekonomi. Pandangan klasik berpendapat bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial manajemen adalah memaksimalkan laba atau memaksimalkan hasil finansial bagi para pemegang saham. Sementara itu, pandangan sosial ekonomi adalah pandangan yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial manajemen bukan sekedar menghasilkan laba tetapi juga mencakup melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dalam pasal 15 (b) yang menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Keputusan Menteri Negeri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor KEP-04/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang

menyatakan adanya peran dari BUMN untuk melaksanakan PKBL, praktik CSR di Indonesia telah diubah dari yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi suatu praktik tanggung jawab yang wajib (*mandatory*) dilaksanakan oleh perusahaan.

Dalam Pasal 66 ayat 2 UUPT No. 40 tahun 2007 disebutkan bahwa laporan tahunan perusahaan diantaranya memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Revisi 2009 paragraf 12 perusahaan masih bersifat sukarela dalam mengungkapkan CSR kepada publik melalui laporan tahunan perusahaan. Dampak dari belum diwajibkan PSAK untuk mengungkapkan informasi sosial menimbulkan praktik pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat *voluntary* (sukarela), *unaudited* (belum diaudit), dan *unregulated* (tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu) (Eka, 2011).

Peristiwa lumpur lapindo di Porong, Sidoarjo Jawa Timur sudah lewat sembilan tahun. Beberapa wilayah di Porong terus memuntahkan ratusan ribu kubik lumpur panas setiap hari. Perdebatan mengenai penyebab bencana tersebut hingga kini terus berlangsung. Menurut studi sebelumnya yang dipimpin oleh Stephen Miller di Universitas Bonn, Jerman, lumpur Sidoarjo dipicu oleh gempa bumi pada 6,3 skala Richter yang melanda Yogyakarta dua hari sebelumnya, yang terletak 250 km jauhnya dari Sidoarjo. Namun analisis terbaru mengatakan bencana tersebut muncul karena ada kesalahan eksplorasi gas, bukan gempa. Hal

itu disampaikan sebuah tim peneliti dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang menulis penelitiannya dalam jurnal *Nature Geosciences* (Sandy, 2015).

Menyemburnya lumpur panas terjadi karena pengeboran yang dilakukan telah melewati batas yang ditentukan. Semburan lumpur lapindo memberi dampak ancaman bahaya bagi masyarakat yang khususnya tinggal di sekitar semburan lumpur lapindo dan memberi ancaman pula terhadap kerusakan lingkungan. Lumpur menggenangi 16 desa di tiga kecamatan, sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi, akibat amblesnya permukaan tanah di sekitar semburan lumpur telah membuat pipa air milik PDAM Surabaya patah, dan masih banyak lagi dampak luar biasa dari semburan lumpur (Sahlani, 2015). Jika dilihat dari sisi etika bisnis, PT. Lapindo Brantas jelas telah melanggar etika dalam berbisnis karena telah melakukan eksploitasi yang berlebihan dan melakukan kelalaian sehingga menyebabkan terjadi bencana besar yang berdampak luar biasa pada lingkungan dan sosial.

Perusahaan tambang batu bara milik Bakrie Group, PT. Kaltim Prima Coal (KPC) diduga mencemari Sungai Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Samarinda. Sungai Sangatta merupakan sumber air baku PDAM. Akibat pencemaran ini, PDAM Kutai Timur mengalami gangguan produksi air bersih. PT. KPC akan tetap patuh bila permasalahan ditindaklanjuti. PT KPC berkomitmen untuk menjalankan praktik penambangan yang baik (Jalil, 2015).

Melalui Forum *Multi Stakeholder for Corporate Social Responsibility* (FMSH for CSR), PT. KPC turut memberikan bantuan berupa pedoman kebijakan, prosedur kerja, serta control program atau proyek yang maksimal. Forum ini juga bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap perkembangan program, serta memastikan dana bantuan yang diberikan, dimanfaatkan dengan baik dan benar. Total realisasi dana CSR PT. KPC tahun 2013 adalah US\$ 5,025 juta. Dana ini dialokasikan untuk 5 bidang, yakni: Pemberdayaan Masyarakat, Hubungan Komunitas, Pembangunan Infrastruktur, Operasional, dan Pelayanan Masyarakat.

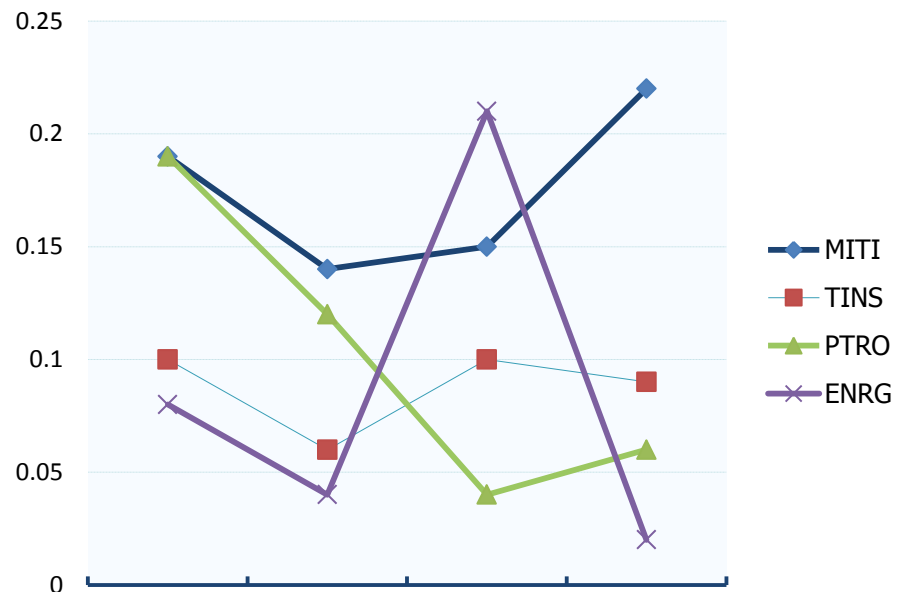
Kesimpulan pada kasus di atas adalah masalah sosial dan lingkungan yang tidak diatur dengan baik oleh perusahaan serta memberikan dampak negatif yang besar. Oleh karena itu, masalah pengelolaan sosial dan lingkungan menjadi aspek yang penting dalam mengoperasikan perusahaan. Penerapan CSR wajib dilakukan perusahaan agar perusahaan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) Marwan Jafar meminta perusahaan seperti tambang, migas, dan sektor kehutanan lebih peduli terhadap desa di sekitar perusahaannya. Karena banyak keluhan masyarakat yang melaporkan keluhan dana CSR dari perusahaan tidak sampai ke desa. Keberadaan CSR harusnya lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungannya untuk

jangka pendek maupun jangka panjang, kontribusi nyatanya bertujuan bagi pembangunan berkelanjutan wilayah produksi perusahaan (Ahy, 2014).

Gambaran lain fenomena kegagalan CSR antara lain kasus PT. Newmont Minahasa Raya, kasus PT. Kelian Equatorial Mining pada komunitas Dayak, kasus pencemaran air raksa yang mengancam kehidupan 1,8 juta jiwa penduduk Kalimantan Tengah yang merupakan kasus suku Dayak dengan Minamata, kasus kerusakan lingkungan di lokasi penambangan timah inkonvensional di pantai Pulau Bangka-Belitung, dan konflik antara PT. Freeport Indonesia dengan rakyat Papua (Anatan, 2010).

Faktor-faktor yang mempengaruhi CSR antara lain, profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan perusahaan, tipe industri, dan kepemilikan saham publik. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, dan ekuitas (Sartono, 2001 dalam 'Amal, 2011). Biaya CSR seringkali menjadi kendala karena pada akhirnya akan mengurangi pendapatan. Giannarakis dan Theotokas (2011) dalam Arifian (2011) menganggap bahwa CSR sebagai ancaman terhadap kelangsungan perusahaan karena adanya tambahan biaya sosial. Konsekuensi logisnya, pelaksanaan CSR akan mengganggu profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan haruslah dalam tingkat profitabilitas yang tinggi untuk memberikan keluwesan manajemen dalam mengungkapkan CSR (Nurkhin, 2009).



Sumber: data diolah.

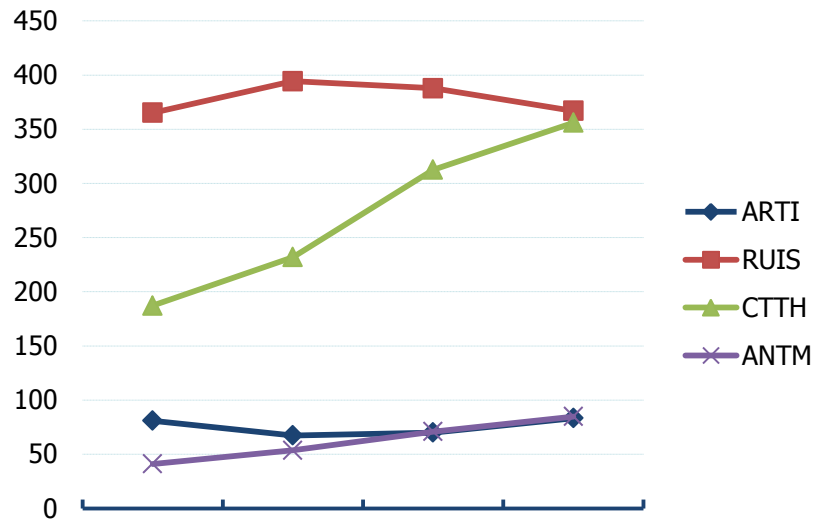
Gambar 1.1 Net Profit Margin (NPM)

Berdasarkan gambar grafik di atas bahwa pertumbuhan *Net Profit Margin* (NPM) pada empat perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014 yaitu PT. Mitra Investindo (MITI), PT. Timah (TINS), PT. Petrosea (PTRO), dan PT. Energi Mega Persada (ENRG) mengalami penurunan pada tahun 2012 namun mengalami peningkatan pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa NPM dari tahun ke tahun mengalami perubahan. NPM yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak begitu berhasil karena tidak efisien dan tidak efektifnya produksi, distribusi, keuangan atau manajemen umum, yaitu kondisi umum perusahaan yang tidak menguntungkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bowman dan Haire (1976) dan Preston (1978) dalam Sumedi (2010) menunjukkan bahwa semakin tinggi

tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan tanggung jawab sosial. Ketika perusahaan mencapai keuntungan, maka perusahaan akan lebih mudah untuk mengalokasikan biaya pengungkapan CSR lebih besar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulfi (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Leverage merupakan ukuran kinerja keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri (Adawiyah, 2013). *Leverage* mencerminkan risiko keuangan perusahaan karena dapat menggambarkan struktur modal perusahaan dan mengetahui risiko tak tertagihnya suatu utang (Sari, 2012).



Sumber: data diolah.

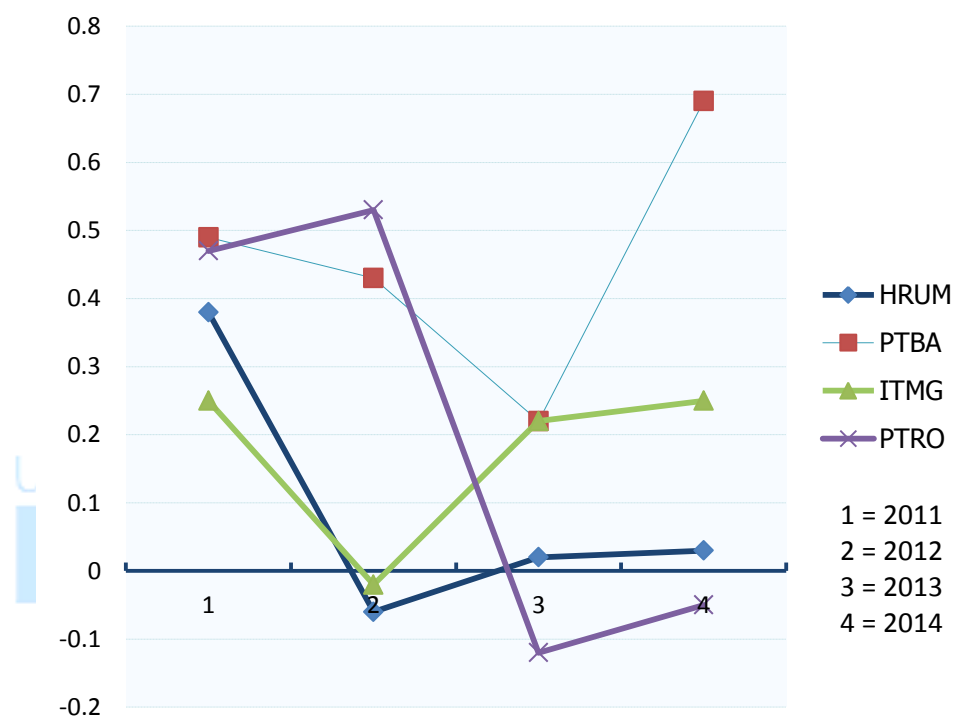
Gambar 1.2 Debt To Equity Ratio (DER)

Berdasarkan gambar grafik di atas bahwa pertumbuhan *Debt To Equity Ratio* (DER) pada empat perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014 yaitu PT. Aneka Tambang (ANTM), PT. Citatah (CTTH), PT. Radiant Utama Interinsco (RUIS), dan PT. Ratu Prabu Energi (ARTI) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi DER berarti modal yang digunakan semakin sedikit dibandingkan dengan hutangnya atau kewajibannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahya (2010) pembahasan mengenai pengungkapan CSR juga dipengaruhi oleh *leverage*. Cahya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *leverage* dan pengungkapan CSR. Ia menyatakan bahwa tingkat *leverage* yang tinggi akan mendorong perusahaan melakukan pengungkapan sosialnya.

Namun, Wijaya (2012) menyatakan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Pertumbuhan perusahaan juga merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan. Lerner (1991) dalam Siregar (2010) menyatakan bahwa semakin besar aset sebuah perusahaan, maka semakin besar tanggung jawab sosialnya, dan hal ini akan dilaporkan dalam laporan tahunan, sehingga pengungkapannya juga semakin luas.



Sumber: data diolah

Gambar 1.3 Pertumbuhan Total Aset

Berdasarkan gambar grafik di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan total aset pada empat perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014 yaitu PT. Harum Energy (HRUM), PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA), PT. Indo Tambangraya Mega (ITMG), dan PT. Petrosea (PTRO) mengalami penurunan aset pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai total aset maka semakin kecil pula pertumbuhan perusahaannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian membuktikan bahwa pertanggung jawaban sosial dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan dimana perusahaan besar cenderung mengungkapkan pertanggung jawaban sosial yang lebih luas.

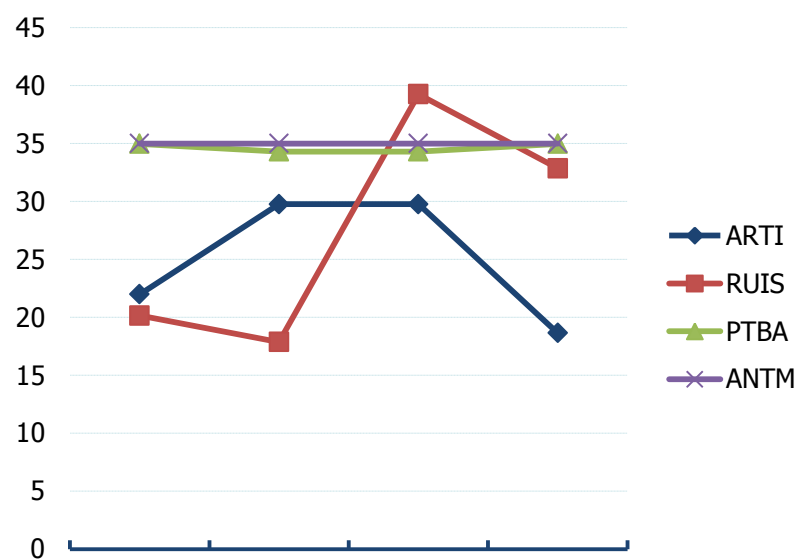
Industri *high profile* sebagai industri yang memiliki *consumer visibility*, risiko politik yang tinggi, atau kompetisi yang tinggi (Utomo, 2000 dalam Sembiring, 2005). Selain itu, perusahaan yang termasuk kategori *high profile* umumnya merupakan perusahaan yang memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasi perusahaan memiliki potensi dan kemungkinan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Perusahaan yang berorientasi pada pelanggan akan lebih memperhatikan pertanggung jawaban sosialnya kepada masyarakat, karena hal ini akan meningkatkan citra perusahaan dan dapat mempengaruhi tingkat penjualan (Sulastini, 2007).

Perusahaan pertambangan mempunyai karakteristik yaitu terdapat empat kegiatan usaha pokok yang meliputi eksplorasi, pengembangan dan konstruksi, produksi, serta pengolahan (Tandiawan, 2013). Pertambangan merupakan industri yang *high profile*. Industri *high profile* pada umumnya memiliki karakteristik seperti memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dan dalam proses produksinya mengeluarkan residu, seperti limbah dan polusi (Zuhroh dan Sukmawati, 2003 dalam Purwanto, 2011). Kesimpulan pada pernyataan diatas bahwa tipe industri *high profile* mempunyai risiko politik yang tinggi dan mempunyai tingkat sensitivitas tinggi terhadap lingkungan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfi (2014) menemukan bahwa tipe industri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Ia menyatakan bahwa perusahaan dengan profil yang tinggi akan mendapat sorotan dari masyarakat sehingga sangat membutuhkan pengungkapan CSR yang lebih baik pula. Semakin baik dan terpandangnya suatu perusahaan akan semakin efektif juga pengungkapan pertanggung jawaban sosialnya.

Adanya pelaporan CSR merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan kegiatan CSR, sehingga para *stakeholders* dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut (Rio Rita dan Sartika, 2013). Secara teoritis, tanpa diwajibkan perusahaan akan dengan sendirinya membuat laporan CSR kepada *stakeholders* karena perusahaan tersebut akan terkena sanksi dari *stakeholders* bila tidak membuat laporan

CSR (Diba, 2012). Sebagai contoh, jika perusahaan tidak mempublikasikan laporan CSR maka para investor akan memberi sanksi. Bentuk sanksi adalah keengganan mereka untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Keengganan tersebut akan menyebabkan harga saham perusahaan jatuh, yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan itu sendiri.



Sumber: data diolah.

Gambar 1.4 Kepemilikan Saham Publik

Berdasarkan gambar grafik di atas menunjukkan bahwa persentase kepemilikan saham publik PT. Aneka Tambang (ANTM) dari tahun 2011-2014 sebesar 35%. Pada tahun 2013 PT. Bukit Asam (PTBA) sebesar 34,31% kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 34,98%. Pada tahun 2013 PT. Radiant Utama Interinsco (RUIS) sebesar 39,26% namun pada tahun 2014 turun menjadi sebesar 32,86%. Pada tahun 2013

persentase kepemilikan saham publik PT. Ratu Prabu Energi (ARTI) sebesar 29,77% namun pada tahun 2014 turun menjadi sebesar 18,65%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil kepemilikan saham publik maka semakin rendah kepentingan publik yang menjadi tanggung jawab perusahaan.

Sebuah penelitian yang berhasil menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR dilakukan oleh Lamia *et al* (2014). Jogiyanto (2003) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan saham publik maka semakin tinggi kepentingan publik yang menjadi tanggung jawab perusahaan.

Perusahaan pertambangan adalah perusahaan yang bergerak di sektor batubara, minyak dan gas bumi, logam dan mineral, dan batubatuan. Dipilihnya perusahaan pertambangan karena dikenal sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan dalam proses produksinya seperti pencemaran limbah perusahaan perlu menerapkan CSR sebagai timbal balik kepada lingkungan sekitarnya. Sementara pembicara lain, Jalal dari Lingkar Studi CSR mengatakan bahwa kegiatan pertambangan tidak selalu membawa dampak negatif berupa kerusakan lingkungan dari usaha pertambangan. Penerapan CSR di industri tambang umumnya diarahkan mengurangi dampak negatif agar program CSR dapat berjalan efektif, maka pelaksanaannya harus bekerjasama dengan pemerintah daerah (Burhani, 2012).

Motivasi dalam penelitian ini adalah terjadi ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya. Hal inilah yang akan menjadi *research gap* dalam penelitian ini, sehingga sangat menarik dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan *research gap* tersebut. Hal ini yang mendorong peneliti untuk berusaha mengidentifikasi bahwa apakah profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan perusahaan, tipe industri, dan kepemilikan saham publik dapat mempengaruhi *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk merumuskan fokus masalah dalam penulisan ini dengan mengambil judul: **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Perusahaan, Tipe Industri, dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* Pada Industri Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014.”**

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang penelitian yang diuraikan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan *Net Profit Margin* yang mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2011-2014 di beberapa perusahaan pertambangan.
2. Pertumbuhan *Debt To Equity Ratio* (DER) dari tahun 2011 sampai dengan 2014 terus mengalami peningkatan di beberapa perusahaan pertambangan.

3. Pertumbuhan total aset yang mengalami penurunan pada tahun 2012 di beberapa perusahaan pertambangan.
4. Persentase kepemilikan saham publik mengalami penurunan dalam kurun waktu 2012-2014 di beberapa perusahaan pertambangan.
5. Tipe industri *high profile* mempunyai risiko politik yang tinggi dan mempunyai sensitivitas tinggi terhadap lingkungan.
6. PT. Lapindo Brantas telah melanggar etika dalam berbisnis karena telah melakukan eksploitasi yang berlebihan dan melakukan kelalaian sehingga menyebabkan terjadi bencana besar yang berdampak luar biasa pada lingkungan dan sosial.

1.2.2 Pembatasan Masalah

1. Periode penelitian yang dilakukan adalah 2010 – 2014.
2. Penelitian hanya memfokuskan objek penelitian ini pada industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Penelitian ini hanya membahas variabel profitabilitas yang diukur dengan menggunakan *Net Profit Margin* (NPM) , *leverage* yang diukur dengan menggunakan *Total Debt To Total Equity Ratio* (DER), ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan pertumbuhan total aset, tipe industri yang diukur dengan menggunakan *dummy variable* yaitu diberi skor 1 apabila perusahaan termasuk dalam industri *high profile* dan skor 0 apabila perusahaan termasuk dalam industri *low profile*, kepemilikan saham publik yang diukur dengan menggunakan rasio

kepemilikan saham publik dan *CSR disclosure* yang diukur dengan menggunakan *CSR Disclosure Index*.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Perusahaan, Tipe Industri, dan Kepemilikan Saham Publik terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada industri pertambangan periode 2010-2014?
2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial Profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada industri pertambangan periode 2010-2014?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial *Leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada industri pertambangan periode 2010-2014?
4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial Pertumbuhan Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada industri pertambangan periode 2010-2014?
5. Apakah terdapat pengaruh secara parsial Tipe Industri terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada industri pertambangan periode 2010-2014?

6. Apakah terdapat pengaruh secara parsial Kepemilikan Saham Publik terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada industri pertambangan periode 2010-2014?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Perusahaan, Tipe Industri, dan Kepemilikan Saham Publik terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada industri pertambangan periode 2010-2014.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada industri pertambangan periode 2010-2014.
3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial *Leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada industri pertambangan periode 2010-2014.
4. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Pertumbuhan Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada industri pertambangan periode 2010-2014.
5. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Tipe Industri terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada industri pertambangan periode 2010-2014.

6. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Kepemilikan Saham Publik terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada industri pertambangan periode 2010-2014.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Perusahaan

Untuk memberikan masukan bagi pengembangan penerapan *Corporate Social Responsibility* dan meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Bagi Investor

Untuk membantu investor menilai entitas yang lebih transparan dan *akuntable* melalui *Corporate Social Responsibility Disclosure* dalam laporan tahunan, serta memberi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi.

3. Bagi Pemerintah

Untuk mengetahui sampai sejauh mana pengungkapan pertanggung jawaban sosial yang telah dilakukan perusahaan sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan suatu standar pelaporan *Corporate Social Responsibility* yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk mengetahui seberapa besar tanggung jawab suatu perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya serta merupakan sebuah aplikasi dari teori yang telah didapatkan oleh peneliti dalam perkuliahan.

